

ABSTRAK

Tukar-menukar merupakan sesuatu hal yang sering dilakukan di kalangan masyarakat. Desa Sidorejo Kabupaten Ngawi berbeda dalam tukar menukarnya masyarakat yaitu menukarkan tanah *gege* masyarakat dengan tanah lapangan milik pemerintahan desa padahal belum memiliki sertifikat dan dilakukan dengan cara lisan. Tujuan penelitian menjelaskan bagaimana praktik tukar menukar tanah *gege* tanpa sertifikat dan tinjauan hukum Islam serta Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian deksriptif analitis komparatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data menggunakan teknik deksriptif analitis komparatif dengan membandingkan dua variable data yaitu berdasarkan hukum Islam dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa status kepemilikan tanah *gege* menurut hukum Islam termasuk al-Milk al-Daulah artinya milik negara sedangkan UUPA termasuk tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Jangka waktu dalam syariat Islam adalah 3 tahun sedangkan UUPA 20 hingga 30 tahun agar dapat didaftarkan dengan ketentuan tidak diklaim dan tidak digugat oleh siapapun. Tukar-menukar yang dilakukan secara lisan termasuk sah dalam pandangan Islam dan UUPA. Namun terdapat kejanggalan yaitu karena objeknya tidak jelas kepemilikannya, dan tidak terdapat sertifikat. Maka, tukar menukar tanah *gege* tidak sesuai syariat Islam karena banyak menimbulkan kemudharatan dan da UUPA juga tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak dengan tanpa adanya sertifikat.

Kata Kunci : Tukar-Menukar Tanah, Tanpa Sertifikat, Lisan, Hukum Islam, Undang-Undang Pokok Agraria

ABSTRACT

Exchanging is something that is often done in the community. Sidorejo Village, Ngawi Regency, differs in the exchange of people, namely exchanging community gege land with field land belonging to the village government even though it does not yet have a certificate and is done verbally. The purpose of the research is to explain how the practice of exchanging gege land without a certificate and review of Islamic law and the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960.

This study uses qualitative research with the type of research that is field research (field research). The nature of comparative analytical descriptive research with a normative juridical approach. The data sources used were primary data sources and secondary data with data collection methods (observation, interviews and documentation). Data analysis techniques used comparative analytical descriptive techniques by comparing two data variables, namely based on Islamic law and UUPA Number 5 of 1960.

The results of the study concluded that the status of gege land ownership according to Islamic law includes al-Milk al-Daulah which means state property, while the UUPA includes land that is directly controlled by the state. The term in Islamic law is 3 years while the UUPA is 20 to 30 years so that it can be registered with the condition that it is not claimed and not sued by anyone. Exchanges made orally are legal in the view of Islam and the UUPA. However, there are irregularities, namely because the object is not clearly owned, and there is no certificate. So, exchanging gege land is not in accordance with Islamic law because it causes a lot of harm and the UUPA is also not allowed because it harms one party without a certificate.

Keywords: Land swaps, without certificates, oral, Islamic law, Basic Agrarian Law

